

## ABSTRAK

Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang banyak dilakukan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Contohnya di sektor pertanian yang diwujudkan dengan pendistribusian pupuk bagi para petani dengan mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat celah bagi beberapa pihak untuk melakukan penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, yaitu tindak pidana korupsi. Negara mengatur kejahatan tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji dan menganalisis penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi; 2) menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi; serta 3) mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerangka teoritis pada penelitian ini terdiri dari teori penegakan hukum dan sistem hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deksiptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan kemudian akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Adapun analisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum dari Lawrence M.Firedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan penyaluran pupuk urea bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukan baik wilayah maupun pihak pengguna atau petani. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi disebabkan dua faktor yaitu hulu dan hilir. Dari sektor hulu, kebijakan berasal dari penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi yang terindikasi adanya transaksional antar pihak pengambil kebijakan. Selain itu, komponen dalam HPP terdapat pembebanan biaya yang belum jelas diatur metode pembebanannya. Sehingga membuka peluang evaluator melakukan diskresi karena adanya ruang multitafsir itu. Terakhir, penegakan hukum tindak pidana pupuk bersubsidi lebih dalam lagi melibatkan lembaga atau institusi pengawasan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena peluang yang sedemikian lebar adanya potensi *moral hazzard* para pemburu rente distribusi pupuk yang sangat panjang.

**Kata kunci: penegakan hukum, penyimpangan pendistribusian, tindak pidana korupsi**

## **ABSTRACT**

*Subsidy policy is a policy that is mostly carried out in several countries, one of which is in Indonesia. Examples in the agricultural sector are realized by distributing fertilizers to farmers by referring to the Definitive Plans of Group Needs (RDKK). However, in its implementation there are still gaps for some parties to make irregularities in the distribution of subsidized fertilizers, namely criminal acts of corruption. The state regulates the crime of corruption with Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law No. 20 of 2001. Therefore, this study aims to: 1) examine and analyze the deviations in the distribution of subsidized urea fertilizer; 2) analyze and explain the factors that influence the deviation of the distribution of subsidized urea fertilizer; and 3) reviewing and analyzing law enforcement against deviations in the distribution of subsidized urea fertilizers in terms of the Corruption Eradication Act. The theoretical framework in this study consists of the theory of law enforcement and the legal system. The research method uses a sociological juridical approach and is qualitative detective. The method of collecting data through interviews and literature studies and then will be analyzed with qualitative descriptive techniques. The analysis uses law enforcement theory and legal system theory from Lawrence M. Friedman. The results showed that the deviation in the distribution of subsidized fertilizers was carried out by distributing subsidized urea fertilizers that were not in accordance with the designation of both the region and the users or farmers. Then the factors that can influence the deviation of the distribution of subsidized fertilizers are due to two factors, upstream and downstream. From the upstream sector, the policy comes from determining the Cost of Production (HPP) of subsidized fertilizers which is indicated by the existence of transactional policy makers. In addition, the component in the HPP has a charge that is not clearly regulated. So that it opens the opportunity for evaluators to do discretion because of the multiple interpretations. Finally, the law enforcement of criminal acts of subsidized fertilizer further involves institutions or supervisory institutions as an effort to prevent criminal acts of corruption, because the opportunity is so wide that the moral potential of the hazard of rent-seekers is very long fertilizer distribution.*

**Keywords:** *law enforcement, distribution irregularities, corruption*